

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAKIP DALAM
MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI
DI KABUPATEN KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Demi Alo Sinulingga

NPP. 29.1009

Asdaf Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: demialo08@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author's focus in this research is on the effectiveness of the preparation of LAKIP in Karo Regency, Sumatra Province through SAKIP which has been implemented since 2014. Where the LAKIP value in Karo Regency is still low. **Objective:** The purpose of this study was to determine the effectiveness of the preparation of LAKIP in improving administrative order in Karo Regency, North Sumatra Province, the obstacles and efforts to overcome them. **Method:** The method used is descriptive qualitative. In this case the assessment of effectiveness through four dimensions, namely Target Achievement, Adaptability, Job Satisfaction and Responsibility. **Result:** The result of this research is that the preparation of LAKIP in Karo Regency is still less effective and still needs a lot of assistance to employees. **Conclusion:** The lack of understanding of employees about SAKIP who still report on the work without attaching the results of the work and the often late submission of reports are obstacles that occur in the preparation of LAKIP in Karo Regency. The delay is an integral part, so even though only one regional apparatus is late, it affects the Karo Regency LAKIP. For this reason, efforts have been made to carry out socialization and assistance in the preparation of LAKIP as well as punishments and awards to regional officials related to LAKIP in Karo Regency, North Sumatra Province.

Keywords: Effectiveness, LAKIP, SAKIP

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Yang menjadi fokus penulis pada penelitian ini adalah tentang efektivitas penyusunan LAKIP yang ada di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera melalui SAKIP yang telah diberlakukan sejak 2014. Dimana masih rendahnya nilai LAKIP yang ada di Kabupaten Karo. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penyusunan LAKIP dalam meningkatkan tertib administrasi di Kabupaten Kato Provinsi Sumatera utara ,hambatan dan upaya dalam mengatasinya. **Metode:** Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif . Dalam hal ini penilaian efektivitas melalui empat dimensi yaitu Pencapaian Target, Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja dan Tanggung Jawab. **Hasil :** Hasil penelitian ini adalah penyusunan LAKIP di Kabupaten Karo masih kurang efektif dan maasih perlu banyak asistensi kepada pegawai. **Kesimpulan:** Kurang pahamnya pegawai tentang SAKIP yang masih melaporkan tentang pengerjaan tanpa melampirkan hasil dari pengerjaan dan pengumpulan laporan yang sering terlambat adalah hambatan yang terjadi dalam penyusunan LAKIP di Kabupaten Karo. Keterlambatan itu merupakan satu kesatuan, sehingga walaupun hanya satu perangkat daerah yang terlamabat maka mempengaruhi kepada LAKIP Kabupaten Karo. Untuk itu upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan asistensi dalam penyusunan LAKIP serta hukuman dan penghargaan kepada perangkat daerah terkait LAKIP di Kabupaten Karo Provnsi Sumatera Utara.

Kata kunci : Efektivitas, LAKIP, SAKIP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dari pada Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menjadi priotitas di instansi pemerintah bahkan sejak reformasi tahun 1998. Pelayanan masyarakat dalam hal ini tuntutan terhadap kebutuhan masyarakat merupakan hasil yang dapat terlihat sangat jelas, apakah masyarakat merasa puas dan segala kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja adalah salah satu program yang dapat menguatkan program tersebut. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan menjadi salah satu cara untuk penguatan akuntabilitas kinerja yang dimaksudkan dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Pelayanan publik yang optimal dan akuntabel merupakan tuntutan yang sedari dulu belum terealisasi secara sempurna di lingkungan pemerintah. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban merupakan peran yang dituntut secara akuntabel kepada setiap pelaku pelayan publik di lingkungan pemerintah. Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur yang disusun secara periodik.

Berdasarkan yang tertuang dalam BPKP (2007) latar belakang penyusunan LAKIP antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, bukan hanya sekedar bekerja tapi bekerja dengan tujuan guna kesejahteraan masyarakat dan disertai laporan yang akuntabel,
2. Pelaksanaan Laporan AKIP maka dibuat dan dikembangkan SAKIP guna mempermudah sistem yang ada,
3. Wujud tanggung jawab untuk mencapai visi dan misi instansi pemerintah dalam perwujudan Good Governance dan diwadahi dengan media LAKIP dalam bentuk pertanggungjawaban laporan.

Bagian Organisasi sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karo memiliki tugas dan fungsi menyusun LAKIP Kabupaten Karo. Namun, dalam hal ini LAKIP Kabupaten Karo merupakan kompilasi dari LAKIP Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Karo. Jadi hal ini Bagian Organisasi hanya melakukan tugas kompilasi dari semua perangkat daerah dan hasil kompilasi dari LAKIP perangkat daerah akan dijadikan laporan yang menjadi LAKIP Kabupaten. Dimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah diatur juknis dalam penyusunan LAKIP. Namun, dalam pengerjaannya dilapangan masih kurang dari yang diharapkan. Dimana dalam LAKIP seharusnya tercantum outcome atau hasil dari pengerjaan dalam satu tahun anggaran. Namun, yang terlampir hanya rancangan anggaran dengan pengerjaan tanpa persentase yang sudah berjalan. Dengan begitu penilaian indikator LAKIP tidaklah lengkap. Juga kedisiplinan dalam pengumpulan LAKIP juga merupakan hal yang menjadi pekerjaan rumah terutama untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo. Hal ini diperkuat dengan evaluasi dari Menpan-RB yang menunjukkan nilai LAKIP dari Kabupaten Karo masih kurang dari yang diharapkan, yakni nilai C dengan indeks nilai 40,90 hanya naik sedikit dari tahun sebelumnya 39,79. Data ini juga diperkuat oleh Kepala Bagian Organisasi Bapak Daut Sembiring S.STP, M.SP yang mengatakan bahwa “Penerapan dari LAKIP sudah berjalan dari 2014. Namun, sama saja jikalau pegawainya kurang memahami konsepnya”. Permasalahan yang terjadi diatas yang menyebabkan penyusunan dari LAKIP di Kabupaten Karo masih kurang efektif.

Kesenjangan masalah yang diambil (GAP/ Penelitian)

Dengan penerapan dari SAKIP diharapkan Perangkat Daerah disetiap lini di pemerintahan daerah memiliki akuntabilitas, yakni kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan. Tapi faktanya dilapangan masih banyak kendala yang dihadapi, mulai dari kurang pahamiannya pegawai tentang konsep dari pada LAKIP yang seharusnya melaporkan segala kegiatan dan pengumpulan LAKIP di beberapa perangkat daerah yang menghambat kompilasi LAKIP Kabupaten Karo sehingga pengumpulannya juga terlambat. Untuk itu sangat perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah secara menyeluruh tanpa terkecuali.

1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang seputar penyusunan LAKIP sebagai indikator akuntabilitas dari pegawai dan pemerintahan daerah. Penelitian Subastian (2015) yang berjudul Laporan Akuntabilitas Kinerja Sinas Pendidikan Kota Surabaya Melalui Pendekatan Value For Money menyimpulkan bahwa implementasi LAKIP di Kota Surabaya yang belum maksimal mengakibatkan LAKIP belum dijadikan sebagai pengambilan keputusan kedepannya. Santoso (2013) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara juga menambahkan bahwa LAKIP masih harus dilakukan perbaikan dalam bentuk penyajian laporan dan penyajian laporan yang masih terkendala dengan indikator. Selanjutnya penelitian Pamungkas dan Yusuf (2012) dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): Penerapan pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor juga menyimpulkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai penegak akuntabilitas kinerja perlu adanya dukungan akuntansi publik dan peran dari pengawasan pusat. Nur dan Rusyidi (2013) dengan judul Integritas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah (Studi Kasus KPPN Malang) lebih lagi menyimpulkan dari hasil penelitiannya beberapa permasalahan masih sering terjadi dalam implementasi LAKIP bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa LAKIP hanya sebagai formalitas, yang mengakibatkan belum ada timbal balik yang terasa dalam perbaikan pelayanan dan juga produktivitas pegawai. Penyusunan manual dalam penyusunan LAKIP juga merupakan suatu kendala bagi pegawai. Selain hal diatas masih ada juga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi prioritas dari beberapa instansi pemerintah. Dan penelitian Taufik (2013) dengan judul Peran Monitoring dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menambahkan bahwa capaian akuntabilitas kinerja rendah di pusat maupun daerah diakibatkan dari kurangnya komitmen dari kepala daerah, pimpinan perangkat daerah dan staf di dalam instansi terkait.

1.3. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa perbedaan diantaranya, penelitian Nur dan Rusyidi (2013) dilakukan di KPPN Malang, penelitian Taufik (2013) mengambil lokus di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, penelitian Pamungkas dan Yusuf (2012) yang dilaksanakan pada Institut Pertanian Bogor (IPB), dan penelitian Santoso (2013) dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, serta penelitian Subastian (2015) dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sementara penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Efektivitas Penyusunan LAKIP dalam Meningkatkan Tertib Administrasi di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dengan metode penelitian deskripsi kualitatif. Sehingga pastinya ada beberapa kebaruan dari segi loku, metode penelitian yang digunakan dan hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan juga mengatasi hambatan yang terjadi.

1.4. Tujuan

Untuk dapat mengetahui dan menganalisis perkembangan efektivitas penyusunan LAKIP dalam meningkatkan tertib administrasi di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo dalam hal ini sebagai bagian yang melaksanakan kompilasi LAKIP dari perangkat daerah menjadi LAKIP Kabupaten Karo.

II. METODE

Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan secara real di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, penulis berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana Efektivitas Penyusunan LAKIP dalam Meningkatkan Tertib Administrasi di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang diambil dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo dan beberapa perangkat daerah yang juga merupakan bagian dari susunan LAKIP Kabupaten Karo. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori efektivitas dalam buku Tangkilisan (1005:141). Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dari masing-masing rumusan masalah. Teori yang digunakan terdiri dari 4 dimensi yakni Pencapaian Target, Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja dan Tanggung Jawab dengan beberapa indikator di masing-masing dimensi.

3.1. Efektivitas Inovasi Pelayanan SI Artis Buka Wajah

Berdasarkan Teori Efektivitas yang dikemukakan dalam Tangkilisan (2005:141) terdapat 4 dimensi dengan beberapa indikator di dalamnya. Keempat dimensi yang dimaksud adalah dimensi Pencapaian Target, Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja dan Tanggung Jawab. Dimensi Pencapaian Target hanya sebatas realisasi anggaran sementara sebagaimana yang diingkan dalam SAKIP bahwa harus dapat dilaporkan kinerja yang dilakukan serta hasil yang didapatkan guna meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat Kabupaten Karo. Dimensi Kemampuan Adaptasi ASN tentang SAKIP ini belum menyeluruh dimengerti mungkin karena kurangnya pemahaman dari pelaksana tugas fungsi ini. Dalam hal ini adalah kasubag pelaporan, keuangan dan evaluasi tiap OPD. Dimana seharusnya bagian ini sudah paham betul dengan konsep dari SAKIP, apalagi hal ini sudah diterapkan sejak 2014 dan sudah seharusnya sudah sangat paham dengan SAKIP.

Terutama orang lama di bagian ini, tapi masalahnya tidak mampu beradaptasi, jadi mungkin perlu dilakukan simulasi penyusunan LAKIP. Dimensi Kepuasan Kerja perangkat daerah masih dapat dikatakan kurang. Karena jikalau OPD yang baik secara nilai namun secara LAKIP Kabupaten tidak berpengaruh karena merupakan penilaian secara menyeluruh. Dan Dimensi Tanggung Jawab dari Kepala Daerah yang memimpin terlaksananya laporan dalam hal ini SAKIP masih kurang. Hal itu dibuktikan dari hasil evaluasi SAKIP. Jikalau dari atasan saja tidak ada kepedulian, OPD yang ada dibawah pun menganggap bahwa ini adalah hal biasa karena tidak terjadinya masalah.

3.2 Hambatan- hambatan Efektivitas Inovasi Pelayanan Melalui SI Artis Buka Wajah

Dalam Penyusunan LAKIP di Kabupaten Karo terdapat beberapa hambatan-hambatan yang penelititemukan, diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman dari ASN tentang LAKIP

Kurangnya pemahaman dari ASN tentang LAKIP terutama dalam hal penyusunan. Masih banyak pegawai terutama hal bagian pelaporan hanya melaporkan ulang realisasi anggarannya, dimana ini bukan hal yang di minta dalam LAKIP. Hal yang diminta adalah laporan seluruh kegiatan dari perencanaan, pengerjaan sampai pada hasil. Tapi kebanyakan OPD hanya melaporkan hanya sampai pada tahap pengerjaan. Namun, yang paling penting adalah dari hasil yang merupakan realisasi jelas untuk dapat dipertanggung jawabkan terutama kepada masyarakat.

2. Keterlambatan dalam pengumpulan LAKIP

Keterlambatan dalam pengumpulan LAKIP karena menunggu sampai pada saat pengumpulan terkahir. Padahal masih ada tahapan lain yang harus dilakukan mulai dari reviu inspektorat. Dimana jikalau pengumpulan saja terlambat akan menghambat kepada tahapan selanjutnya. Dan jika satu OPD saja yang terlambat akan menghambat seluruh pelaporan LAKIP ke pusat.

3.3. Upaya – upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

Beberapa upaya – upaya yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo dalam mengatasi hambatan penyusunan LAKIP, diantaranya :

1. Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman LAKIP

Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman LAKIP kepada masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Karo dan akan dilaksanakan rapat setiap bulan untuk menjelaskan tentang penyusunan LAKIP. Rapat ini berguna untuk meningkatkan pemahaman pegawai masing-masing OPD tentang LAKIP dan bagaimana sebenarnya sistem LAKIP dalam SAKIP dengan baik dan benar yang nantinya akan meningkatkan nilai akuntabilitas dari pada LAKIP Kabupaten Karo yang merupakan kompilasi dari setiap OPD di setiap lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Karo.

2. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada OPD

b. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada OPD terkait LAKIP. Sehingga akan adalah sanksi kepada OPD yang laporannya kurang dari yang diharapkan dan terlebih lagi yang terlambat dalam pengumpulannya ke SAKIP. Sanksi yang diberikan dapat sanksi lisan maupun secara tertulis untuk lebih peduli lagi terhadap waktu terutama dalam hal ini adalah waktu pengumpula LAKIP. Dan tentunya ada penghargaan kepada OPD yang mempunyai LAKIP sesuai dengan yang diharapkan dan mengumpulkan LAKIP tepat waktu.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat diskusi temuan utama yaitu kurang pemahannya perangkat daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam penyusunan LAKIP yang sudah berjalan sejak 2014. Yang dimana dengan kurang lebih 7 (tujuh) tahun sistem ini berjalan seharusnya sudah paham dengan sistem kerja dari SAKIP. Tapi dalam realitanya dilapangan masih banyak nilai dari LAKIP masih dibawah standar bahkan mencukupi pun tidak. Seperti halnya Kabupaten Karo mendapat nilai “C” yang merupakan nilai terendah dari indeks yang ada. Padahal dalam pengerjaan kinerja hanya melaporkan perencanaan, pengerjaan dan laporan hasil yang tercantum dalam laporan. Namun, pada kenyataannya hanya dianggap sebagai laporan rutin yang berjalan dari tahun ke tahunnya. Dimana seharusnya dengan adanya SAKIP ini memudahkan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait kinerja dan akuntabilitas pegawai. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan, yakni penelitian Subastian (2015) dimana belum maksimalnya implementasi dari LAKIP, penelitian Santoso (2013) dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah sesuai permenpan namun masih perlu adanya perbaikan, penelitian Pamungkas dan Yusuf (2012) dimana pengukuran terhadap indikator yang kurang baku sehingga penilaian terhadap indikator tidak terlaksana dengan baik, dan penelitian Taufik (2013) dimana kepala daerah sebagai pemangku kebijakan wajib melaporkan tanggung jawab kepada seluruh stake holder sebagai pertanggung jawaban, serta penelitian Nur dan Rusyidi (2013) dimana pelaporan kinerja masih kurang optimal dan LAKIP masih dijadikan sebagai hal yang formalitas saja setiap tahun anggarannya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya adalah masih sering terjadi keterlambatan dalam pengumpulan LAKIP kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo sebagai bagian yang mempunyai tugas dan fungsi mengkompilasi LAKIP dari setiap perangkat daerah menjadi sebuah LAKIP Kabupaten Karo. Namun, ada beberapa perangkat daerah yang menjadi langgana terlamabat pengumpulan karena merupakan kumpulan dari beberapa bagian juga. Diantaranya adalah Kecamatan yang menunggu laporan dari setiap desa dan kelurahan dan juga jarak yang jauh menjadi alasan. Padahal batas dari pengumpulan sudah disepakati bersama. Dan juga Dinas Kesehatan yang menunggu laporan dari setiap puskesmas di setiap kecamatan di Kabupaten Karo. Hal keterlambatan ini sangat mempengaruhi karena jika satu LAKIP perangkat daerah saja yang terlambat mempengaruhi kompilasi dari LAKIP Kabupaten Karo karena merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas penyusunan LAKIP di Kabupaten Karo masih berjalan kurang efektif tampak dari pencapaian target yang masih terealisasi, kemampuan adaptasi ASN di Kabupaten Karo terhadap LAKIP yang masih belum memahami secara keseluruhan padahal sudah berlaku sejak 2014, kepuasan kerja yang kurang karena belum terealisasinya penghargaan dan sanksi kepada seluruh perangkat daerah terkait LAKIP dan tanggung jawab terutama pimpinan daerah dan kepala daerah yang merupakan penggerak utama dari setiap program kegiatan. Hambatan-hambatan dalam penyusunan LAKIP adalah kurangnya pemahaman ASN tentang LAKIP dalam SAKIP yang seharusnya sudah terealisasi dan keterlambatan perangkat daerah dalam mengumpulkan LAKIP kepada Bagian Organisasi Kabupaten Karo sebagai yang mengkompilasi LAKIP Kabupaten. Dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan penyusunan LAKIP adalah melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman LAKIP kepada perangkat daerah dan memberikan penghargaan dan sanksi kepada perangkat daerah terkait LAKIP di Kabupaten Karo.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang tergolong singkat yaitu hanya selama 2 minggu. Karena waktu yang singkat ini mengakibatkan penelitian yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Waktu penelitian yang diberikan juga disesuaikan dengan Kalender Akademik IPDN Tahun 2021/2022.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang dilakukan penelitian kali ini terutama terkait penyusunan LAKIP di Kabupaten Karo. Saran dari penulis agar dapat dilakukan penelitian lagi secara mendalam untuk melengkapi kekurangan pada lokus dan fokus yang sama supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal terutama efektivitas dalam penyusunan LAKIP di seluruh pemerintahan daerah dan pusat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo beserta jajaran yang telah memperbolehkan penulis melakukan penelitian serta dapat bertukar pikiran dan pendapat selama melakukan penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian tanpa terkecuali.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardiyos. 2006. Kamus Standar Akuntansi. Citra Harta Prima. Jakarta.

Adi, S. 2003. Pengertian Peningkatan Menurut Ahli.

<http://www.Duniapelajar.com.pengertian-Peningkatan-Menurut-ParaAhli.Html>. (Diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 11.45 WIB).

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert C. & Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach In The Social Sciences*, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons. Surabaya : Usaha Nasional.
- BPKP. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- _____. 2011. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Creswell W. John. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. and Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moloeng, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur, M., dan M. K. Rusydi. 2013. "Integritas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah (Studi Kasus KPPN Malang)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 1, No. 2, hlm: 1-32.
- Pamungkas, B., dan E. S. Yusuf. 2012. "Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): Penerapan pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor". *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, Vol. 7, No. 1, hlm: 8-13.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ravianto. 2014. *Produktivitas dan Manajemen*. Jakarta: LSIP.
- Santoso, S. 2013. "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara ". *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, Vol. 1, No. 4, hlm: 160-170.

- Siagian, Sondang. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku. Jakarta: Erlangga.
- Subastian, A. 2015. "Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Melalui Pendekatan Value For Money". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 2, No. 11, hlm: 1-22.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Supriyono. 2000. Akuntansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana.
- Taufik, T. 2013. "Peran Monitoring dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah". Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), Vol. 1, No. 2, hlm: 199-212.
- The Liang Gie. 2007. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- untidar.ac.id (diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 21.50 WIB)
- www.menpan.go.id/ (diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 21.31 WIB)
- <https://karokab.go.id/id/produkhukum/kabupaten/peraturanbupati> (diakses pada tanggal 3 September 2021)